

**EVALUASI TINGKAT KEKUMUHAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DI MOROWALI UTARA**

Reinaldy Pabuang¹, Loudy M.B. Kalalo², & Surjadi Suparjo³

¹Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Sam Ratulangi

^{2&3}Staf Pengajar Prodi S1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sam Ratulangi
Manado

Email :

reinaldypabuang630@gmail.com; surijadisupardjo@unsrat.ac.id; lodykalalo@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Di Kabupaten Morowali Utara pada area permukiman masih terdapat kawasan kumuh yang jika tidak mendapat perhatian akan memengaruhi pembangunan daerah dan tingkat kesejahteraan penduduk. Penelitian ini dilakukan dengan melihat isu kekumuhan yang belum ditangani secara komprehensif oleh pemerintah kabupaten. Lokasi penelitian ditentukan di Tiga kelurahan dan satu desa yaitu kelurahan Kolonodale, kelurahan Bahoue, kelurahan Bahontula dan desa Korolaki kecamatan Petasia kabupaten Morowali Utara. Secara administratif lokasi penelitian ini berada di pusat ibu kota kabupaten Morowali Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada kondisi kehidupan di wilayah tersebut, kondisi bangunan, maupun sarana dan prasarannya. Analisis data menggunakan metode analisis pembobotan (skoring). Berdasarkan hasil dan evaluasi diketahui bahwa lokasi penelitian masuk dalam kategori kumuh ringan berdasarkan aspek-aspek tingkat kekumuhan yaitu terdiri dari kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, kondisi proteksi kebakaran, legalitas lahan. Dan yang menjadi faktor dominan terjadinya kekumuhan adalah kondisi bangunan yang ada di daerah pinggir pantai ataupun yang dibangun diatas laut dimana bangunan berdiri secara tidak beraturan dan dibangun di tempat yang tidak semestinya menyebabkan kawasan tersebut menjadi semrawut dan kumuh.

Kata Kunci: Evaluasi, Permukiman Kumuh, Tingkat Kekumuhan

In North Morowali Regency, particularly residential areas, there are still slum areas which, if not given attention, will affect regional development and the level of welfare of the population. Based on this issue, this research was conducted by looking at slum issues that have not been handled comprehensively by the local government. The research locations were selected in three sub-districts and one village, namely Kolonodale sub-district, Bahoue sub-district, Bahontula sub-district and Korolaki village, Petasia sub-district, North Morowali district. Administratively, the research location is in the center of the capital city of North Morowali district. This study used descriptive qualitative method. This research focuses on the living conditions in the area, the condition of the buildings, as well as the facilities and infrastructure. Data analysis used the method of weighting analysis (scoring). Based on the results and evaluation, it is found that the research location is included in the moderate slum category based on aspects of the slum level, consists of building conditions, environmental road conditions, drinking water supply conditions, environmental drainage conditions, wastewater management conditions, solid waste management conditions, fire protection conditions, land legality. And what is the dominant factor in the occurrence of slums is the condition of the buildings on the beach or those built on the sea where the buildings stand irregularly and are built in places that shouldn't cause the area to become unclean and undevelop.

Key words: Evaluation, Slum, Level of Slum, Scoring

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan perkotaan permasalahan permukiman kumuh cukup

menjadi polemik dan juga menjadi salah satu isu utama, karena dari waktu ke waktu telah dilakukan upaya pengelolaan yang

berbanding lurus dengan terus berkembangnya kawasan kumuh dan meningkatnya kawasan kumuh baru. Seperti di Kabupaten Morowali Utara yang merupakan kabupaten yang masih terbilang baru, persoalan permukiman kumuh menjadi persoalan yang serius karena dikhawatirkan pembangunan yang tidak terencana akan menimbulkan masalah yakni timbulnya kawasan-kawasan kumuh baru. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali Utara pasal 44 tentang Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Permukiman “peremajaan kawasan permukiman kumuh di perkotaan”. Ini berbanding lurus dengan adanya beberapa industri serta pertambangan di Morowali Utara yang menyebabkan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan juga bertambahnya kawasan kumuh baru. Maka dari itu perlu dilakukan peremajaan kawasan permukiman di perkotaan. Dalam SK BUPATI MOROWALI UTARA Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Morowali Utara juga sudah menetapkan lokasi-lokasi kawasan kumuh yang terdapat di beberapa desa dan kelurahan termasuk ketiga kelurahan dan satu desa yang ada dalam lokasi penelitian ini. Masalah permukiman kumuh di lokasi penelitian yang berada di Kelurahan

Kolonodale, Kelurahan Bahoue, Kelurahan Bahontula, dan Desa Korolaki Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara menjadi suatu masalah serius dimana yang menjadi permasalahan utama adalah kondisi serta lokasi tempat tinggal yang tidak semestinya digunakan untuk mendirikan rumah karena dapat menyebabkan terjadinya kesemrawutan lingkungan yang membuat lingkungan tersebut menjadi kumuh. Namun, keberadaan kawasan perumahan dan permukiman dengan kondisi lingkungan yang kumuh menjadi acuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kekumuhan di wilayah tersebut. Dalam hal ini secara khusus dilakukan penelitian untuk Menganalisis tingkat kekumuhan di Kelurahan Kolonodale, Kelurahan Bahoue, Kelurahan Bahontula, dan Desa Korolaki Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, Berdasarkan aspek-aspek kriteria kekumuhan dan Mencari Faktor-faktor terbentuknya lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di kelurahan Kolonodale, kelurahan Bahoue, kelurahan Bahontula, dan Desa Korolaki Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Perumahan

Perumahan adalah kumpulan perumahan sebagai bagian dari permukiman perkotaan dan perdesaan, dengan prasarana, sarana, dan fasilitas

umum sebagai hasil upaya mewujudkan perumahan yang layak huni. (UU No.1 Tahun 2011).

Permukiman

Definisi Permukiman menurut Menurut peraturan Undang-undang No.4 Tahun 1992 Pasal 3, Tentang Perumahan dan Permukiman menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang berada di luar kawasan lindung, baik yang berada di area perkotaan ataupun yang berada di area perdesaan yang difungsikan sebagai tempat tinggal serta tempat berlangsungnya kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan.

Permukiman Kumuh

Menurut peraturan Undang-undang No.1 Tahun 2011, Tentang Perumahan dan Permukiman, Kawasan Permukiman kumuh merupakan kawasan permukiman tidak layak huni dampak dari pembangunan suatu kawasan permukiman yang tidak terencana, kepadatan bangunan yang tinggi, serta kualitas sarana prasarana yang tidak sesuai persyaratan teknis atau tidak memenuhi persyaratan.

Ciri-Ciri Permukiman Kumuh

- a. Penduduk sangat padat berjumlah 250-400 jiwa/Ha. Menurut ahli perkotaan, jika suatu kawasan mencapai kepadatan penduduk 80

jiwa/Ha akan menimbulkan suatu permasalahan yang diakibatkan oleh kepadatan yang ada, dimana Rumah-rumah yang dibangun tidak lagi sesuai dengan syarat fisiologis, psikologis serta pencegahan penyakit.

- b. Kondisi jalanan yang sempit sehingga tidak bisa lagi dilalui kendaraan roda empat yang disebabkan lebar jalan yang tidak sesuai, serta terkadang jalanan tersebut tersembunyi oleh atap rumah yang saling bersentuhan
- c. Sistem pengelolaan drainase sangat buruk dimana di sebagian jalan tidak terdapat drainase, yang menyebabkan jalan menjadi tergenang oleh air ketika terjadi hujan.
- d. Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat sedikit. Sebagian dari mereka langsung membuang kotorannya ke saluran air dekat rumahnya atau langsung ke laut.
- e. Penyediaan fasilitas air bersih yang terbatas, menggunakan air dari sumur dan juga air hujan.
- f. Penataan bangunan yang tidak beraturan dan kondisi bangunan tidak permanen bahkan bersifat darurat ekstrim.
- g. Kepemilikan tanah yang masih di kuasai oleh negara dan penduduk

tersebut tidak memiliki kuasa atau hak atas lahan tersebut.

Faktor-Faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman Kumuh

Menurut (Rindjono, 2013) Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh adalah faktor urbanisasi, faktor sarana dan prasarana, faktor sosial ekonomi, faktor tata ruang, serta faktor lahan perkotaan. Menurut Surtiani (2006) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya kawasan kumuh adalah lama tinggal penduduk di suatu daerah, dan status sosial ekonomi masyarakat serta status kepemilikan lahan/tanah. Berdasarkan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2014 menyebutkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kawasan kumuh adalah faktor sosial dan budaya, faktor urbanisasi, lahan perkotaan, daya tarik kota serta faktor sosial dan ekonomi.

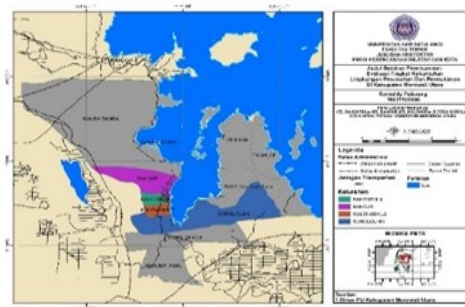
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana dilakukan pendekatan, penelusuran, serta mengeksplorasi suatu gejala sentral, kemudian dilakukan wawancara terhadap narasumber yang berada di dalam lingkup

lokasi penelitian. Setelah mendapatkan data yang diperlukan kemudian dilakukan analisis dan dituangkan dalam laporan tertulis. skema pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif adalah dimana penelitian ini berfokus pada kondisi kehidupan di wilayah tersebut, kondisi bangunan, maupun sarana dan prasarananya. Sementara untuk jenis penelitiannya menggunakan metode analisis pembobotan (skoring).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 1. Peta Administrasi Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di tiga kelurahan dan satu desa yaitu Kelurahan Kolonodale, Kelurahan Bahoue, Kelurahan Bahontula, dan Desa Korolaki Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara.. Lokasi penelitian ini berada di pusat ibu kota Kabupaten Morowali Utara yaitu di Kelurahan/Kota Kolonodale.

Evaluasi Tingkat Kekumuhan Lokasi Penelitian

Keteraturan Bangunan

Tabel 1. Kondisi eksisting bangunan

No	Kondisi Bangunan	Jumlah Bangunan
1	Teratur	1057
2	Tidak Memiliki Keteraturan	1568
Jumlah		2.625

Sumber: Survey Lapangan 2022

Untuk menghitung nilai keteraturan bangunan dapat digunakan teknik penilaian sebagai berikut:

- Jumlah bangunan yang memiliki keteraturan dengan jumlah : 1568 Unit.
- Jumlah keseluruhan bangunan di lokasi penelitian: 2625 unit.
- Total rata-rata bangunan yang tidak memiliki keteraturan ?

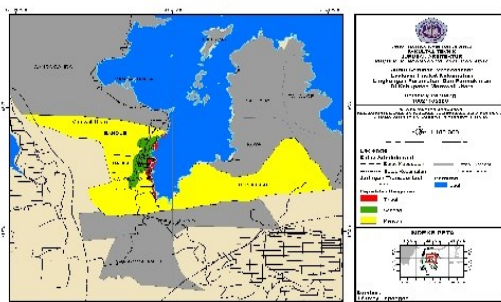
Maka:

$$\frac{\text{Bangunan tidak memiliki keteraturan}}{\text{Jumlah keseluruhan Bangunan}} 100\%$$

$$\frac{1568}{2625} 100\%$$

$$= 60\%$$

Kepadatan Bangunan



Gambar 2. Peta Kepadatan Bangunan

luas atap yang berada di lokasi penelitian dan jumlah luas lahan blok permukiman di lokasi penelitian. Berikut adalah cara menghitung tingkat kepadatan bangunan bangunan:

Maka:

$$\frac{\text{Luas Atap (M}^2\text{)}}{\text{Luas Blok Permukiman (M}^2\text{)}} 100\%$$

$$\frac{351.680}{386.000} 100\%$$

$$= 91\%$$

Persyaratan Teknis

Tabel 2. Perizinan Bangunan Di Lokasi Penelitian

No	Persyaratan	Jumlah Bangunan
1	Memiliki IMB	2086
2	Tidak Memiliki IMB	539
Jumlah		2.625

Sumber: Dinas PU Kabupaten Morowali Utara

Teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui presentase persyaratan teknis bangunan adalah sebagai berikut:

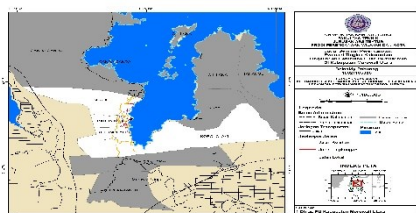
- Total jumlah bangunan yang tidak sesuai persyaratan teknis : 53 Unit
- Total jumlah keseluruhan bangunan pada lokasi penelitian : 2625 Unit
- Total Rata-rata bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis ?

$$\frac{\text{Total jumlah Bangunan yang tidak memiliki persyaratan teknis}}{\text{Jumlah bangunan di lokasi penelitian}} 100\%$$

$$\frac{539}{2625} 100\%$$

$$= 20$$

Kondisi Jalan Lingkungan



Gambar 3. Peta Jaringan Jalan

Cakupan Pelayanan

Untuk Cakupan pelayanan jalan lingkungan, Pada lokasi penelitian ini yakni di tiga kelurahan dan satu desa berdasarkan hasil survey lapangan sudah sangat memadai dimana di setiap jalan sudah menggunakan aspal dan untuk jalan-jalan lingkungan juga sudah menggunakan beton. Untuk akses ke lokasi penelitian biasa di lalui dengan menggunakan kendaraan roda empat maupun kendaraan yang lebih besar dan untuk jalan-jalan lingkungan lainnya juga bisa di lalui dengan baik menggunakan roda dua. Namun masih ada sebagian jalan yang berlobang tapi hal tersebut masih bisa dikategorikan sebagai kerusakan sedang karena hanya sekitar berapa meter.

Kualitas Jalan

Tabel 4. Kondisi Jalan Lokasi Penelitian

No	Nama Jalan	Kondisi Jalan			
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Aspal	✓	-	✓	-
2	Beton	✓	-	-	-

Sumber: Dinas PU Kabupaten morowali utara, Survey lapangan 2022

- Total panjang jalan keseluruhan :
20.561 Meter

- Total panjang jalan kondisi baik :
20.526 Meter
- Total panjang jalan rusak sedang:
35 Meter

Maka :

$$\frac{\text{Total panjang jalan kondisi rusak sedang}}{\text{Total panjang jalan keseluruhan}} 100\%$$

$$\frac{35}{20.561} 100\%$$

$$= 1\%$$

Pelayanan Air minum

Akses Pelayanan Air minum

Tabel 5. Penggunaan Sumber Air Minum

No	Sumber Air	Jumlah
1	PDAM	1.768
2	Sumur Bor	826
3	Sumur Galian	30

Sumber: Dinas PU Kabupaten morowali utara, Survey lapangan 2022

Maka :

$$\frac{\text{Total jumlah bangunan NON PDAM}}{\text{Total Jumlah Bangunan Keseluruhan}} 100\%$$

$$\frac{856}{2625} 100\%$$

$$= 33\%$$

Cakupan Pelayanan Air Minum

Cakupan penilaian untuk pelayanan air minum PDAM dapat digunakan penilaian sebagai berikut:

- Tingkat Ketidاكلancaran: 8 Jam/Hari
- Tingkat Kelancaran yang ideal : 24 jam/Hari

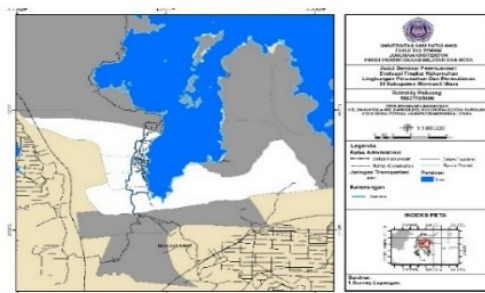
Maka:

$$\frac{\text{Tingkat Kelancaran}}{\text{Tingkat kelancaran ideal}} 100\%$$

$$\frac{8}{24} 100\%$$

$$= 33\%$$

Kondisi Drainase Lingkungan



Gambar 4. Peta jaringan Drainase Lingkungan

Cakupan Pelayanan Drainase

Tabel 6. Perbandingan Panjang jalan dan panjang drainase

No	Nama Jalan	Panjang Jalan (M)	Panjang Drainase (M)
1	Aspal	20.561	3000
2	Beton		-
Jumlah		20.561	3000

Sumber: Dinas PU Kabupaten morowali utara, Survey lapangan 2022

Cara untuk mengetahui cakupan pelayanan drainase sudah tersedia dengan baik atau belum dapat digunakan teknik penilaian berikut:

- Total Panjang Jalan Keseluruhan: 20.561 Meter
- Total Panjang Drainase: 3000 Meter

Maka:

$$\frac{\text{Total Panjang Drainase}}{\text{Total Panjang Jalan}} 100\%$$

$$\frac{3000}{20.561} 100\%$$

$$= 14\%$$

Kualitas Drainase

Tabel 7. Kondisi Drainase Lokasi Penelitian

No	Nama Jalan	Kondisi Dan Panjang (M)			
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Aspal	2377	623	-	-
2	Beton	-	-	-	-

Sumber: Dinas PU Kabupaten morowali utara, Survey lapangan 2022

Cara untuk mengetahui Skala pelayanan kualitas drainase dapat digunakan teknik penilaian seperti berikut:

- Panjang Drainase: 3000 meter
- Panjang drainase dalam kondisi baik: 2377 Meter
- Panjang Drainase Rusak: 623 Meter

Maka :

$$\frac{\text{Total Panjang Drainase Yang Rusak}}{\text{Total Panjang Drainase}} 100\%$$

$$\frac{623}{2377} 100\%$$

$$= 26 \%$$

Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Persyaratan Teknis Pengelolaan Air Limbah

Tabel 8. Persyaratan Teknis MCK di Lokasi Penelitian

No	Persyaratan Teknis MCK	Jumlah Bangunan (Unit)
1	Memenuhi Persyaratan	2440
2	Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis	185
Jumlah		2625

Sumber: Dinas PU Kabupaten morowali utara, Survey lapangan 2022

Teknik yang dapat digunakan untuk penilaian cakupan persyaratan teknis MCK sebagai berikut:

- Total MCK yang tidak sesuai persyaratan teknis: 185 unit
- Jumlah Bangunan yang MCK memenuhi persyaratan: 2440 unit.

Maka :

$$\frac{\text{Jumlah MCK Tidak Sesuai Persyaratan Teknis}}{\text{Jumlah Bangunan Yang Memiliki MCK}} 100\%$$

$$\frac{185}{2440} 100\%$$

$$= 7\%$$

Cakupan Pelayan Pengelolaan Air Limbah

Tabel 9. Kondisi MCK di Lokasi Penelitian

No	Sanitasi Lingkungan (Pembuangan Limbah Cair)	Jumlah Bangunan (Unit)
1	Memiliki MCK	2539
2	Tidak Memiliki MCK	86
Jumlah		2625

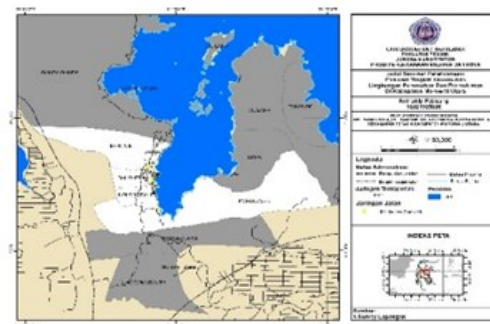
Sumber: Dinas PU Kabupaten morowali utara, Survey lapangan 2022

Teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui cakupan pelayanan MCK adalah sebagai berikut :

$$\frac{86}{2625} 100\%$$

$$= 3\%$$

Pengelolaan Persampahan



Gambar 5. Peta jaringan Persampahan

Persyaratan Teknis

Teknik pengelolaan sampah yang baik dapat dilihat dari tempat sampah yang ada di lingkungan sekitar dan pemilahan sampah skala domestik ataupun skala rumah tangga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan proses pengelolaan sampah sudah berjalan dengan baik dimana dinas lingkungan hidup bidang persampahan hampir setiap pagi keliling mengangkut sampah menggunakan mobil dan dibawah ke TPA, begitupun untuk pemilihan sampah baik sampah organik maupun sampah anorganik di beberapa titik telah disediakan tong sampah yang sesuai. Untuk kontener-kontener sampah juga sudah disediakan di setiap titik keramaian seperti sekolah, pasar, dan perkantoran. maka teknis pengelolaan persampahan di lokasi penelitian sudah baik yakni 25%-50%.

Cakupan Pelayanan Pengelolaan Persampahan

Tabel 10. Kondisi Persampahan

No	Persampahan	Jumlah Bangunan (Unit)
1	Memiliki TPS	2425
2	Tidak Memiliki TPS	200
Jumlah		2625

Sumber: Dinas PU Kabupaten morowali utara, Survey lapangan 2022

Teknik yang digunakan untuk penilaian cakupan pelayanan persampahan adalah sebagai berikut :

- Jumlah Bangunan yang tidak memiliki TPS: 200 Unit
- Jumlah Bangunan: 2625 Unit

Maka :

$$\frac{\text{Jumlah Bangunan Non TPS}}{\text{Jumlah Bangunan}} 100\%$$

$$\frac{200}{2625} 100\%$$

$$= 8\%$$

Proteksi Kebakaran

Persyaratan Teknis Proteksi Kebakaran

Teknik yang digunakan untuk mengetahui cakupan persyaratan teknis proteksi kebakaran adalah sebagai berikut :

- Jumlah Titik Pasokan Air Pemadam Kebakaran: 13 sumber air
- Luas Wilayah : 3212 meter
- Tingkat Pelayanan?

Maka :

$$\frac{\text{Jumlah Sumber Air Pemadam Kebakaran}}{\text{Luas Wilayah}} 100\%$$

$$\frac{13}{3212} 100\%$$

$$= 4\%$$

Cakupan Pelayanan Proteksi

Kebakaran

Berdasarkan Wawancara dengan warga sekitar, masyarakat belum memiliki APAR (alat pemadaman api ringan) namun untuk mobil pemadam kebakaran hampir titik di lokasi penelitian sudah bisa digapai namun ada beberapa titik yang belum bisa dijangkau mobil pemadam kebakaran. maka di lokasi penelitian sebanyak 26% tempat yang belum memadai untuk pelayanan proteksi kebakaran.

Legalitas Lahan

Kejelasan Status Penguasaan Lahan

Beberapa tempat tidak ada kepemilikan tanah yang jelas, baik milik masyarakat ataupun milik pemerintah dengan jumlah bobot (+1)

Kesesuaian Rencana Tata Ruang (RTR)

Lokasi penelitian sudah berada dalam zona peruntukan perumahan dan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang (RTR) dimana kelurahan kolonodale sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) dengan jumlah bobot (-1)

Pertimbangan Lain

Nilai Strategis Lokasi

Lokasi Penelitian terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota yaitu adanya pusat kegiatan wilayah yang terdapat dalam rencana tata ruang RTRW kabupaten morowali dengan jumlah bobot (-1).

Kependudukan Untuk Metropolitan Kota Besar

Di lokasi penelitian jumlah penduduk berjumlah >200 dengan jumlah bobot 5.

Kondisi Sosial,Ekonomi, dan Budaya

Dalam hal kondisi sosial,ekonomi,budaya dapat dikembangkan serta dilestarikan dengan jumlah bobot 5.

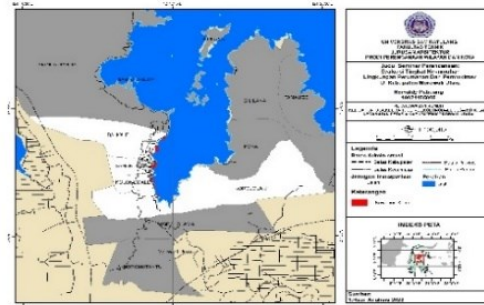
Hasil Evaluasi Tingkat Kekumuhan Wilayah Lokasi Penelitian

Penilaian Kekumuhan Secara Fisik Pada Lokasi Penelitian

Persebaran kawan kumuh di di Kelurahan Kolonodale, Kelurahan Bahoue, Kelurahan Bahontula, dan Desa Korolaki Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, Terdapat beberapa titik dimana rata-rata kawasan kumuh muncul di permukiman yang ada di pinggir pantai ataupun permukiman yang berdiri di atas laut hal ini disebabkan oleh bangunan yang berdiri secara tidak beraturan dan membentuk kawasan-kawasan kumuh, Menurut hasil penelitian yang saya lakukan didapatkan luas lokasi kumuh di lokasi penelitian antara lain: Kelurahan Bahoue: 12 Ha,

Kelurahan Bahontula: 8 Ha, Kelurahan Kolonodale: 5 Ha, Desa Korolaki: 2 Ha

Persebaran Kawasan Kumuh Di Lokasi Penelitian



Gambar 6. Peta Persebaran Kawasan Kumuh

Tabel 11. Analisis Pembobotan Kawasan Kumuh

KONDISI PENGHELAAN AIR LIMBAH	a. Persyaratan Teknis	7% pengolahan air limbah di lokasi penelitian tidak sesuai standar teknis	0
	b. Cakupan Pelayanan	3% pengolahan air limbah di lokasi penelitian tidak sesuai persyaratan teknis	0
KONDISI PENGHELAAN PERSAMPAHAN	a. Persyaratan Teknis	25%-50% pengolahan persampahan yang tidak berjalan dengan baik	1
	b. Cakupan pelayanan persampahan	8% pengolahan persampahan yang tidak sesuai aturan pengolahan sampah	0
KONDISI PROTEKSI KUBAKAHAN	a. Persyaratan Teknis	4% sumber air pada lokasi penelitian masih sulit dijangkau	0
	b. Cakupan Pelayanan	26% pelayanan damkar yang belum memadai	1
LEGALITAS LAHAN	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Sebagian lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan dengan nilai bobot 1	-1
	b. Kesesuaian Rencana Tata Ruang	Sebagian lokasi penelitian berada pada pusat kegiatan wilayah sesuai RTRW Kabupaten Morowali Utara Lokasi Penelitian terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	-1
PERTIMBANGAN LAJIN	a. Nilai Strategi Lokasi		-1
ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	NILAI
KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Keteraturan Bangunan	60% bangunan pada lokasi penelitian tidak memiliki keteraturan	3
	b. Kepadatan Bangunan	76%-100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5
	c. Persyaratan Teknis	20% bangunan pada lokasi penelitian tidak sesuai persyaratan teknis	0
KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan	10% jalan lingkungan pada lokasi penelitian yang tidak baik	0
	b. Persyaratan teknis	1% jalan pada lokasi penelitian tidak memenuhi persyaratan teknis	0
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Persyaratan Teknis	33% masyarakat tidak mengakses air minum dengan baik	0
	b. Cakupan Pelayanan	33% masyarakat yang tidak mendapatkan suplai air yang baik	1
KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Kondisi Drainase	14% drainase yang ada tidak dalam kondisi baik	0
	b. Kualitas Drainase	26% pada lokasi penelitian tidak terlayani drainase	1
	b. Kependudukan untuk metropolitan dan kota besar	Penduduk di lokasi penelitian berjumlah >200 jiwa	5
	c. Kondisi sosial ekonomi dan budaya	Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	5
Jumlah bobot			21

Sumber: Hasil Analisis 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di lokasi penelitian yang berada di 3 kelurahan yaitu kelurahan Bahontula, kelurahan Bahoue, kelurahan Kolonodale, dan 1 desa yaitu desa Korolaki ditemukan tingkat kekumuhan lingkungan yang masuk dalam tingkat kategori kumuh ringandengan bobot skor 21.

Faktor-faktor fisik penyebab permukiman kumuh

Kondisi Kepadatan Bangunan

Dari hasil penelitian yang didapatkan di lapangan adalah penyebab terjadinya kepadatan bangunan atau timbulnya bangunan yang tidak beraturan dikarenakan banyak dijumpai masyarakat migran yang membangun rumah ditempat yang tidak semestinya yaitu membangun diatas laut/rumah apung sehingga untuk pembangunannya sangat tidak beraturan,hal tersebut yang mengakibatkan terjadinya pemadatan bangunan dan membentuk kawasan kumuh diakbitkan rumah yang sangat padat dan dibangun secara berdekatan.

Kondisi Drainase

Dari hasil penelitian yang didapatkan di lapangan untuk kondisi drainase yang ada sudah baik dan juga berfungsi dengan baik walaupun ada beberapa drainase dalam kondisi rusak ringan, dan untuk jumlah

drainase masih sangat kurang jika dilihat dari panjang jalan yang ada.

Jaringan air bersih

Dari hasil penelitian yang didapatkan di lapangan mengenai jaringan air bersih dimana rata-rata rumah sudah menggunakan air PDAM, namun untuk tingkat kelancaran masih kurang ideal dimana hanya mengalir sekitar 6 jam sehari ataupun biasa tdk mengalir diakibatkan oleh pengeloan PDAM yang tidak optimal. Pada sebagian rumah juga ada yang menggunakan sumur bor dan sumur gali, rumah-rumah tersebut rata-rata yang berdiri diatas laut/rumah apung dengan kondisi air yang berbau tidak sedap.

Jaringan air limbah

Dari hasil penelitian yang didapatkan di lapangan mengenai jaringan air limbah masih ada sebagian rumah yang pengelolaan air limbahnya tidak baik dimana sebagian rumah yang ada sudah memiliki MCK namun tidak memiliki kloset serta septik tank dan limbah tersebut langsung di buang ke laut sehingga terjadi pencemaran air.

Persampahan

Dari hasil penelitian yang didapatkan di lapangan mengenai pengelolaan persampahan di lokasi penelitian, sudah

berjalan dengan baik dimana untuk pengangkutan sampah yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup rutin dilakukan dan di setiap titik-titik keramaian sudah disediakan konteiner sebagai TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sebelum dibawa ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Jaringan jalan

Dari hasil penelitian yang didapatkan dilapangan mengenai jaringan jalan sudah baik dimana jalan di lokasi penelitian terbagi atas aspal dan beton yang kondisinya sudah baik maupun masih ada beberapa yang dalam kondisi rusak ringan tapi untuk keseluruhannya sudah bisa di kategorikan baik.

Faktor Legalitas Lahan, Sosial dan Ekonomi

- a. Lahan memiliki status kejelasan kepemilikan
- b. Kesesuaian Rencana Tata Ruang (RTR)
- c. Nilai Strategis Lokasi
- d. Kependudukan Untuk Metropolitan Kota Besar
- e. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian terhadap evaluasi tingkat kekumuhan lingkungan

perumahan dan permukiman di Kabupaten Morowali Utara dapat disimpulkan, yaitu:

1. Kategori kekumuhan di lokasi penelitian yang berada di tiga kelurahan dan satu desa yaitu kelurahan Bahontula, kelurahan Bahoue, kelurahan Kolonodale, dan desa Korolaki yang berada di kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara masuk dalam kategori kumuh ringan,
2. Faktor penyebab terbentuknya lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Kolonodale, Kelurahan Bahoue, Kelurahan Bahontula, dan Desa Korolaki Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara adalah dari segi faktor fisik yaitu kondisi bangunan, kondisi jalan, pelayanan air minum, drainase, persampahan, proteksi kebakaran, dan juga dari segi faktor legalitas lahan dan sosial ekonomi.
3. Faktor dominan penyebab kekumuhan jika ditinjau dari hasil analisis data adalah dari kondisi bangunan yang ada di daerah pinggir pantai ataupun yang dibangun diatas laut dimana bangunan berdiri secara tidak beraturan dan dibangun di tempat yang tidak semestinya menyebabkan kawasan tersebut menjadi semrawut dan kumuh.

SARAN

1. Untuk pemerintah kabupaten Morowali Utara agar dapat mencari solusi untuk masyarakat yang tinggal di rumah apung agar bisa di reklamasi atau tindakan lainnya yang berdampak baik bagi masyarakat maupun daerah tersebut.
2. Untuk masyarakat agar dapat memperhatikan aspek-aspek seperti pembuatan jamban serta pembuatan tempat pembuangan limbah rumah tangga agar tidak langsung di salurkan ke laut
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk dapat diperhatikan serta dikembangkan sehingga berdampak baik bagi Kabupaten Morowali Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2018. *Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh*
- Anonim, RTRW Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036
- Anonim, RTRW Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036 pasal 44 tentang Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman
- Anonim, UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Anonim, UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
- Arief, A. S., H. Redin, dan Amelia, V. (2021) Tingkat kekumuhan dan pola penanganan kawasan permukiman Murjani Bawah di Kota Palangka Raya. *Journal of*, 2(1), 71-81.
- Maresty K, A. I Winny, dan E. Fitriarini (2019) Faktor yang mempengaruhi keberadaan kawasan permukiman kumuh di surakarta *jurnal spasial volume 1, nomor 1, 2019* 24-33
- Muta'ali, L., (2016) *Perkembangan Environment and Management Program Penanganan Permukiman Kumuh di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prayitno, B., (2016) *Skema Inovasi Penanganan Permukiman Kumuh*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Surtiani, E. E., (2006) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Pusat Kota*. Semarang: Tesis Magister Teknik

Pembangunan Wilayah dan Kota
Universitas Diponegoro

Rindarjono, M. G (2012) Slum: Kajian
Permukiman Kumuh Dalam Perspektif
Spasial. Yogyakarta: Media Perkasa